

PROFIL WKSBM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DI YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul)

Suyanto

ABSTRAK

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan definisi di atas, maka sasaran identifikasi ini dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas sendiri atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (desa/kelurahan); (2) Nilai sosial budaya lokal, meliputi adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Dari hasil kajian diperoleh gambaran mengenai profil WKSBM khususnya yang berada di Kabupaten Gunung Kidul adalah sebagai berikut: (1) WKSBM di Kabupaten Gunung Kidul sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun; (2) Jumlah kelompok WKSBM di tiap-tiap desa rata-rata diatas 50 kelompok perkumpulan; (3) WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam rangka mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat dan pada umumnya memiliki criteria keanggotaan menempati atau berdomisili pada wilayah tertentu; (4) Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya sendiri; (5) Kegiatan WKSBM diwarnai dan dijiwai semangat kebersamaan yang intinya ingin membantu orang lain dan kegotong royongan.

Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan intervensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalan sumber dana.

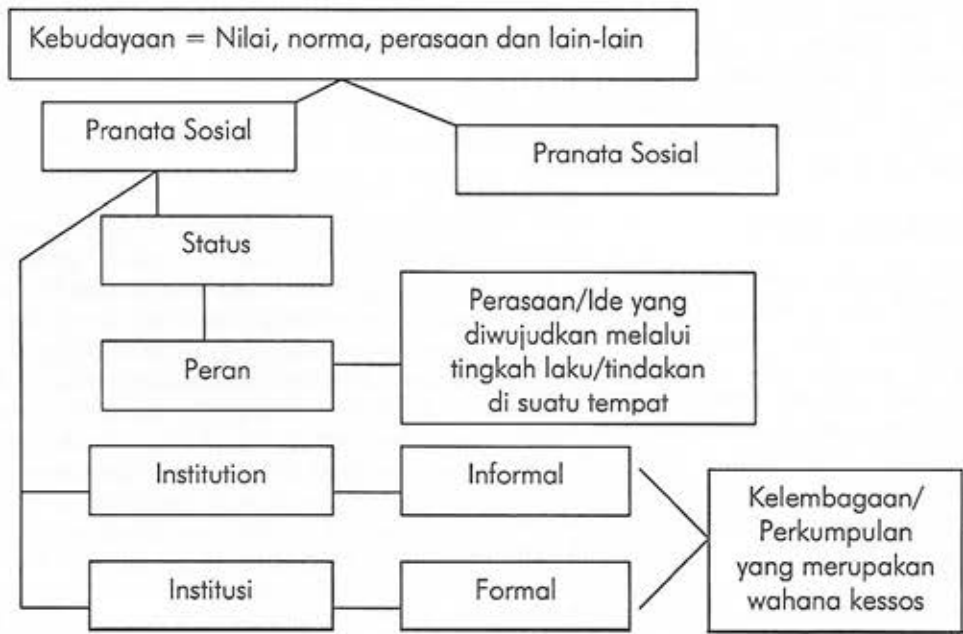
1. PENDAHULUAN

Ketika kondisi perekonomian nasional dalam keadaan normal, kebijaksanaan pembangunan lebih diarahkan pada paradigma pembangunan yang mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi. Ketika itu pendekatan pembangunan kesejahteraan yang digunakan adalah *residual approach* yakni pelayanan sosial diberikan manakala permasalahan sosial sudah muncul. Gaya pendekatan seperti itu menyebabkan pembangunan kesejahteraan sosial yang diemban Departemen Sosial terkesan *charity* dan terlambat. Setelah mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1997 menyebabkan sumber daya moneter menjadi terbatas, akibatnya anggaran yang disediakan untuk

Departemen Sosial juga menjadi terbatas pula. Menyadari kondisi tersebut, paradigma pembangunan yang perlu dikembangkan adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *People Centered Development* (PCD). Dalam program ini partisipasi masyarakat menjadi perhatian pemerintah. Salah satu strategi yang dikembangkan dalam konsep pendekatan PCD adalah pemberdayaan masyarakat terutama yang menjadi sasaran pelayanan sosial adalah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Pranata Sosial atau perkumpulan sosial. Seperti diketahui bahwa pranata sosial yang ada dan eksis di masyarakat saat ini dapat dikatakan sebagai wadah atau tempat untuk memberikan pelayanan sosial;

Pranata sosial menurut Paulus Wirotomo (2004) mengutip definisi Selo Soemartjan adalah sebagai kumpulan nilai dan norma yang mengatur suatu bidang kehidupan manusia. Sedangkan Pranata Sosial di ditinjau dari segi kebudayaan melalui pendekatan *ethnoscience* atau *cognitive anthropology* diartikan sebagai pola bagi tindakan dan tingkahlaku manusia yang dilakukan pada suatu tempat. Dengan demikian pengertian pranata sosial juga dapat disebut sebagai kebudayaan karena pranata sosial berisikan seperangkat pengetahuan manusia yang berupa sistem nilai-nilai, resep-resep, blue-print, dan norma-norma serta aturan-aturan yang terdapat didalam kepala manusia sebagai pengetahuan kebudayaan, yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan sosialnya, dan digunakan serta dijadikan pedoman tindakan tingkah lakunya, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta digunakan untuk memahami, memanipulasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan hidupnya. Dengan uraian seperti tersebut diatas dapat dijelaskan melalui skema dibawah ini:

Skema: Pranata Sosial ditinjau dari konsep kebudayaan.



Pranata sosial ini bila diartikan secara sempit ada yang berbentuk formal dan non formal. Pranata sosial formal biasanya dibentuk atas prakarsa kebutuhan pelayanan yang biasanya keberadaannya didukung pemerintah daerah bahkan sampai di tingkat pusat atau organisasi yang besar yang bertaraf nasional dan bahkan internasional. Pranata sosial non formal dibentuk atas prakarsa warga masyarakat setempat berdasarkan atas etnis tertentu, agama, profesi, kebutuhan warga masyarakat tertentu. Oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini Departemen Sosial RI sudah mulai mengarahkan program-programnya pada strategi pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pranata sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional memandang kemiskinan sebagai suatu masalah yang perlu mendapat penanganan serius karena merendahkan martabat kemanusiaan. Demikian juga dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial, kemiskinan merupakan suatu akar dari masalah kesejahteraan sosial lainnya, walaupun terdapat banyak masalah kesejahteraan lain yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Pembangunan nasional sebenarnya telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi 11,3 persen atau 22,5 juta pada tahun 1996. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam upaya menghapus kemiskinan dengan dicanangkannya kebijaksanaan "Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan" (MPMK) pada sidang Kabinet terbatas tanggal 22 April 1997. Dimana operasional kebijaksanaan menghapus kemiskinan tersebut pada intinya meliputi kegiatan Program Keluarga Sejahtera, Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), dan Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS), Program Pendidikan dan Latihan serta berbagai program terkait lainnya. Program-program tersebut merupakan bagian dari tiga kelompok kebijaksanaan pembangunan yang luas (Laporan terpadu PROKESRA, 1997).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Program Keluarga Sejahtera yang dikenal dengan TAKESRA dan KUSESRA dimotori oleh BKKBN, kemudian Program IDT pelaksanaannya dikembangkan Bappenas. Sedangkan Departemen Sosial RI sendiri mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai PROKESOS. Program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan semenjak REPELITA III namanya Bimbingan dan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat serta Usaha Swadaya Sosial Masyarakat (BPKM-USSM). Setelah Departemen Sosial berdiri lagi Program kesejahteraan sosial oleh Direktorat Pemberdayaan, Departemen Sosial RI mulai mengembangkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *People Centered Development* (PCD). Pemberdayaan yang terpusat pada masyarakat ini terutama ditujukan kepada pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, namun dalam pelaksanaannya ternyata baru dalam tahap pendataan. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Karena dari berbagai studi menunjukkan bahwa peranan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat sangat besar dalam pembangunan masyarakat. Masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dengan cara partisipasi itu dilakukan melalui perkumpulan yang sudah

dikenalnya atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya pelaksanaan suatu kegiatan ditingkat masyarakat akan kurang berhasil secara optimal bila mana tidak melibatkan dan memperhitungkan keberadaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Peran aktif kelompok lokal ini lebih jauh lagi dapat memfasilitasi persatuan nasional dan mengakomodasi tuntutan berbagai kelompok untuk partisipasi, berpolitik dan pengaturan diri yang lebih mandiri.

Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat adalah system kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan definisi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di atas, maka sasaran identifikasi ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas sendiri atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (desa/kelurahan).
2. Nilai sosial budaya lokal, yang meliputi adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Meskipun beberapa studi berhasil menunjukkan peran aktif dan memberi kontribusi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun demikian sampai saat ini belum tersedia adanya data tentang keberadaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, baik dalam jumlah, bentuk dan tipologi atau model-model kegiatannya.

Pada tahun 1997/1998 dengan terjadinya krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi, masalah kemiskinan kembali meningkat, karena banyak penduduk jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pada bulan

April 1998 menurut BPS jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 79,4 juta jiwa atau 33,9% dari seluruh penduduk yang jumlahnya mencapai 202 juta (Kepala BPS, Sigit Soewito, MA).

Dalam kaitan ini Departemen Sosial RI melalui pembangunan Kesejahteraan Sosial telah sejak REPELITA IV melaksanakan pengentasan kemiskinan sesuai dengan amanat konstitusi yang dikenal dengan Program Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (PROKESOS KUBE). Sedangkan secara nasional pengentasan kemiskinan pada intinya adalah kegiatan Program Keluarga Sejahtera, Program IDT, PROKESOS, Program Pendidikan dan Latihan serta program terkait lainnya. Program-program tersebut merupakan bagian dari 3 (tiga) kelompok kebijaksanaan pembangunan yang luas (Laporan terpadu PROKESRA 1997).

PROKESOS pada dasarnya adalah program pengentasan kemiskinan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

Secara kuantitas jumlah WKSMB ada di semua Lokasi Kelurahan yang ada di DI Yogyakarta Namun sejauh mana data dan program WKSMB tersebut belum diperoleh informasi. Disamping itu bagaimana metode dan teknik pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan, yang mungkin sudah dilihat secara internal pada program implementer perlu diinventarisasi dan dievaluasi sebagai masukan bagi pengembangan program pemberdayaan dimasa-masa yang akan datang, oleh sebab itu Pusat Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial pada awal tahun 2006 mengadakan kegiatan mengidentifikasi profil dan kegiatan WKSMB dalam pembangunan kesejahteraan sosial karena dipandang perlu untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan WKSMB yang sebagian besar

adalah bentukan warga yang tumbuhnya dari masyarakat lokal dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif. Adapun sifat penelitiannya adalah diskriptif kualitatif dengan pokok bahasannya adalah hasil pelaksanaan pendataan program pemberdayaan untuk WKSMB/perkumpulan sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial dan bantuan pemberian pelayanan bagi masyarakat melalui pendekatan kelompok swadaya masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Fokus telaahan pada kondisi WKSMB, Struktur organisasi, sumber dana, kondisi tenaga, proses pelaksanaan pemberdayaan dan manfaat atau keberhasilan usaha dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di lingkungannya.

Pemilihan sample lokasi ditentukan secara purposif berdasarkan adanya program yang menjadi sasaran penelitian yang telah melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Adapun sample lokasi terpilih yakni di empat Desa yang berlokasi di empat Kecamatan: Empat Desa tersebut adalah (1) Desa Balearjo, di Kecamatan Wonosari; (2) Desa Watusigar, di Kecamatan Ngawen; (3) Desa Playen di Kecamatan Playen dan (4) Desa Tepus di Kecamatan Tepus. Pemilihan responden juga ditentukan secara purposif dan jumlah responden sebanyak 349 orang semuanya dari pengurus atau anggota kelompok salah satu perkumpulan.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yakni: (a) Wawancara, (b) Studi Dokumentasi dan (c) observasi. Analisa menggunakan analisa kualitatif dalam mendiskripsikan kondisi kelompok.

Ada lima aspek yang menjadi perhatian dalam pengkajian ini, lima aspek tersebut adalah: (1) Aspek identitas perkumpulan sosial atau wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat; (2) Aspek keanggotaan; (3) Aspek

Sumber daya dan dana; (4) Aspek program dan kegiatan lembaga; dan (5) Aspek jaringan kerja.

III. HASIL PENELITIAN

A. Monografi Daerah Penelitian

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas wilayah 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi dalam 4 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu: Kabupaten Kulonprogo dengan luas wilayah 586,85 km² (18,40%), dengan jumlah penduduk 448.091 jiwa; Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 506,85 km² (15,91%), dengan jumlah penduduk 789.745 jiwa; Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah 1.485,36 km² (46,62%), dengan jumlah penduduk 751.423 jiwa; Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 574,82 km² (18,04%), dengan jumlah penduduk 874.195 jiwa; dan Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,50 km² (1,02%), dengan jumlah penduduk 874.798 jiwa.

Pada tahun 2002 Propinsi DIY dengan jumlah penduduk sebanyak 3.374.968 jiwa merupakan daerah terpadat ke dua di Indonesia setelah DKI. Pada akhir tahun 2002 tercatat jumlah rumahtangga 769.265.

Mata pencaharian penduduk beraneka ragam mata pencaharian dan tidak ada mata pencaharian penduduk yang mayoritas. Mata pencaharian penduduk adalah petani, peternak, usaha warungan (dagang), home industri, dagang candak kulak, karyawan, pertukangan dan lain-lain.

B. Identitas Kelembagaan Perkumpulan Sosial di Lokasi Daerah Penelitian

Kajian Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul dilakukan di 4 (empat) desa. Dari pendataan tersebut diperoleh 349 kelompok atau perkumpulan sosial (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat/WKSBM) yang ada di masyarakat. Terhimpun dalam 23 jenis kelompok/perkumpulan sosial yang dikategorikan dalam Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Jenis-jenis kelompok tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Kelompok/Perkumpulan Sosial (WKSBM) di Empat Desa Pada Kabupaten Gunung Kidul.

No	Jenis Kelompok	Tahun Berdiri					
		< 10 Tahun		> 10 Tahun		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Dasa Wisma	6	31,60	13	68,40	19	100
2	Posyandu	2	15,40	11	84,60	13	100
3	PKK	3	6,25	45	93,75	48	100
4	KUBE	12	40,00	18	60,00	30	100
5	Pemuda	10	55,60	8	44,40	18	100
6	Tani	1	6,67	14	93,33	15	100
7	Sinoman	1	14,30	6	85,70	7	100
8	Pengajian	6	28,60	15	71,40	21	100
9	Rukun Tetangga	6	6,45	87	93,55	93	100
10	Usia Lanjut	1	100,00	0	0	1	100
11	IDT	0	0	6	100,00	6	100
12	Persekutuan Doa	1	25,00	3	75,00	4	100
13	Kesenian	7	33,30	14	66,70	21	100
14	Paguyuban Warga Dusun	1	9,09	10	90,01	11	100
15	Siskamling	0	0	18	100,00	18	100
16	PKBM	0	0	1	100,00	1	100
17	LPMD	2	100,00	0	0	2	100
18	Keluarga Muda Mandiri	1	100,00	0	0	1	100
19	Klompencapir	0	0	1	100,00	1	100
20	Olahraga	2	20,00	8	80,00	10	100
21	Rukunwarga	0	0	6	100,00	6	100
22	Budaya/Adat	0	0	2	100,00	2	100
23	BPD	1	100	0	0	1	100
Jumlah		63	18,10	286	81,90	349	100

Dari data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa tahun berdirinya sebagian besar 68,4 % atau sebanyak 13 jenis WKSMB telah berumur atau berdiri lebih dari 10 tahun; yang berumur kurang dari 10 tahun ada 6 lembaga perkumpulan (WKSMB) atau sebesar 31,6%. Keadaan ini menunjukkan bahwa kepentingan/kebutuhan bersama telah lama dirasakan dan diupayakan dicarikan jalan pemecahannya yang dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok tersebut biasanya dimulai dari tingkat Rukun Tetangga, Dasawisma, kelompok PKK dan usaha bersama. Semua kelompok tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota. Tujuan pembentukan kelompok ada bermacam-macam sesuai kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan warganya. Untuk itu masing-masing WKSMB atau kelompok sosial memiliki identitas yang berbeda dapat diuraikan satu persatu dari tujuan didirikannya lembaga sosial tersebut sebagai berikut:

1. Perkumpulan dasawisma; Tujuan diririkannya Dasawisma ini memiliki identitas kelompok yang beranggotakan kurang lebih 10 Kepala Keluarga (KK), pada umumnya anggotanya terdiri dari kaum wanita dan ibu rumahtangga. Kegiatan yang dilakukan umumnya berupa pertemuan rutin dengan acara arisan, simpan pinjam, tabungan, ceramah keagamaan atau usaha-usaha yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga.
2. Perkumpulan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), kelompok ini biasanya beranggotakan ibu-ibu rumahtangga yang memiliki anak balita. Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat atas prakarsa dari pemerintah. Tujuan kelompok ini untuk meningkatkan kesehatan anak dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Selain itu pada umumnya memiliki kegiatan pemeriksaan kesehatan balita, menimbang balita, pelayanan keluarga berencana dan penyuluhan peningkatan gizi keluarga.
3. PKK, Kelompok ini beranggotakan kaum wanita dan ibu rumahtangga, tujuan kelompok ini adalah usaha peningkatan

kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan seperti arisan, simpan pinjam, tabungan, gotong royong, usaha ekonomis produktif yang dikerjakan oleh ibu-ibu/kaum wanita. Mempunyai jangkauan wilayah berjenjang dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.

4. KUBE (Kelompok Usaha Bersama), kelompok ini pada umumnya beranggotakan 10 kepala keluarga dari keluarga kurang mampu (miskin) yang memiliki usaha kecil-kecilan. Kelompok ini dibentuk untuk meningkatkan penghasilan dengan kegiatan utama adalah ekonomi produktif. Pembentukan kelompok ini pada umumnya diprakarsai oleh pemerintah melalui proyek-proyek tertentu.
5. PEMUDA. Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat dengan anggota yang memiliki kriteria keanggotannya berusia tertentu yaitu antara usia 19 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Kelompok pemuda ini pada umumnya memiliki kegiatan edukatif, ekonomis produktif dan rekreatif.
6. TANI. Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat atas prakarsa pemerintah dalam upaya peningkatan hasil pertanian. Kelompok ini beranggotakan para petani dan memiliki kegiatan usaha peningkatan penghasilan.
7. Seniman. Perkumpulan warga masyarakat yang memiliki minat dan bakat dibidang kesenian baik kesenian tradisional maupun kesenian modern seperti jathilan, karawitan, keroncong, kethoprak dan sejenisnya. Kelompok kesenian ini memiliki kegiatan latihan rutin dan pentas untuk mengisi acara permintaan atau acara-acara tertentu. Kelompok kesenian ini pada umumnya beranggotakan orang dewasa.
8. Pengajian. Kelompok ini terdiri dari majlis Ta'lim dan Takmir masjid. Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi kaum muslim. Kegiatan yang dilakukan kelompok ini diantaranya adalah mengadakan pengajian.

9. Rukun Tetangga. Kelompok ini merupakan lembaga integrasi masyarakat terkecil, yang beranggotakan sejumlah Kepala Keluarga, bertugas membantu pemerintah mengintegrasikan warganya dan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dalam urusan pemerintahan seperti: memberikan surat keterangan domisili dan lain sebagainya. Dalam mengintegrasikan warganya kelompok ini memiliki kegiatan kemasyarakatan seperti pertemuan berkala, arisan, gotong-royong, urusan kematian dan lain-lainnya.
10. Kelompok Lansia. Tujuan dibentuknya kelompok lansia ini oleh masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dengan cara memberikan pelayanan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para lansia, senam sehat bagi lansia serta kegiatan dalam upaya pengembangan konsep "tua berguna".
11. IDT. Kelompok ini dibentuk pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tertinggal.
12. Persekutuan Doa. Tujuan dibentuknya kelompok ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi kaum kristiani. Kegiatan yang dilakukan kelompok persekutuan doa adalah kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan.
13. Kesenian. Kelompok ini terdiri dari kumpulan warga masyarakat yang mempunyai minat dan bakat dibidang kesenian baik itu kesenian tradisional maupun modern. Kelompok ini memiliki kegiatan latihan rutin dan pentas untuk mengisi acara permintaan atau acara-acara tertentu, misalnya peringatan hari-hari besar nasional.
14. Kelompok Paguyuban Warga Dusun. Kelompok ini dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Tetapi pada umumnya banyak yang berfungsi sebagai "wahana rembug desa". Biasanya kelompok ini beranggotakan bapak-bapak dan mengadakan pertemuan setiap 35 hari sekali atau setiap (bahasa jawa "selapan") hari sekali. Pada acara pertemuan rutin tersebut biasanya diisi dengan acara-acara rembug desa, arisan, simpan pinjam dan lain sebagainya sesuai keperluan.
15. Siskamling (Kelompok system keamanan lingkungan). Kelompok ini dibentuk masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan rasa aman. Kelompok ini pada umumnya beranggotakan pria dewasa berusia di atas 19 tahun.
16. PKBM (Pendidikan Ketrampilan Berbasis Masyarakat). Kelompok ini dibentuk pemerintah dengan tujuan pemberantasan buta huruf namun didalam pelaksanaannya tidak hanya pemberantasan buta huruf saja.
17. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Kelompok ini dibentuk dengan prakarsa dari pemerintah dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pembangunan di tingkat desa.
18. Keluarga Muda Mandiri. Kelompok ini dibentuk oleh pemerintah melalui program UP2WKSS dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan wanita dan keluarga.
19. Klompencapir. Kelompok ini dibentuk masyarakat atas prakarsa pemerintah dalam rangka peningkatan pengetahuan petani sehingga dapat meningkatkan hasil pertaniannya.
20. Olahraga. Kelompok ini dibentuk masyarakat untuk mewadahi kegiatan sesuai dengan minat dan bakat warga masyarakat dalam bidang olah raga. Pada umumnya memiliki kriteria keanggotaan usia tertentu yakni antara 19 – 40 tahun.
21. Rukun Warga. Kelompok ini merupakan lembaga integrasi masyarakat, yang beranggotakan sejumlah Rukun Tetangga (RT), bertugas membantu pemerintah mengintegrasikan warganya dan memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dalam urusan pemerintahan seperti: memberikan surat keterangan domisili dan lain sebagainya. Dalam mengintegrasikan warganya kelompok ini memiliki kegiatan kemasyarakatan seperti arisan, gotong-royong, urusan kematian dan lain-lainnya.

22. Budaya/Tradisi/Adat. Kelompok ini memiliki kegiatan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat secara turun temurun merupakan kegiatan ritual untuk mengucapkan syukur dan memohon keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan tradisi/adat/budaya ini biasanya berupa sesaji yang dilakukan secara berkelompok, seperti bersih dusun/desa, rasulan, sedekah laut dan sejenisnya. Anggota dari kelompok ini adalah seluruh kepala keluarga yang berdomisili pada lingkup wilayah tertentu.
23. BPD. Kelompok ini merupakan Badan Legislatif di tingkat desa yang bertugas untuk bersama-sama dengan perangkat desa menentukan kebijaksanaan pembangunan desa.

Dari jumlah jenis perkumpulan tersebut di atas paling banyak adalah kelompok rukun tetangga dengan jumlah 93 kelompok atau sebesar (26,65%), diikuti kelompok PKK dengan jumlah 48 kelompok atau sebesar (13,75%), kemudian diikuti KUBE, (Pengajian dan

kesenian), Dasawisma, (Pemuda dan Siskamling). Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan kelompok berdasar pada "kewilayahan" yaitu Rukun Tetangga dan "kepentingan/kebutuhan bersama dalam kelompok kecil" seperti Rukun tetangga, PKK, Dasawisma, KUBE, dan lain-lain.

Sedangkan jika dilihat dari tujuan dari pembentukan kelompok ada bermacam-macam, yakni: untuk meningkatkan kesejahteraan anak, Kesejahteraan ibu dan anak, Kesejahteraan lansia, Peningkatan pendapatan integrasi masyarakat dan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan lain-lainya. Keadaan ini menguatkan anggapan bahwa perkumpulan/kelompok tersebut dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan bersama anggotanya.

C. Keanggotaan

Keanggotaan perkumpulan sosial hasil kajian adalah jumlah anggota, kriteria anggota, syarat menjadi anggota, pendidikan dan periode kepengurusan. Akan diuraikan berikut:

Tabel 2.
Jumlah Anggota Kelompok Sosial

No	Jenis Kelompok	Jumlah Anggota							
		< 10 orang		11 – 20 orang		>20 orang		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Dasa Wisma	0	0	16	84,21	3	15,79	19	100
2	Posyandu	0	0	2	15,40	11	84,60	13	100
3	PKK	0	0	7	14,60	41	85,40	48	100
4	KUBE	7	23,33	6	20,00	17	56,67	30	100
5	Pemuda	0	0	5	27,80	13	72,20	18	100
6	Tani	1	6,67	5	33,33	9	60,00	15	100
7	Sinoman	0	0	5	71,40	2	28,60	7	100
8	Pengajian	0	0	1	4,76	20	95,20	21	100
9	Rukun Tetangga	0	0	4	4,33	89	95,67	93	100
10	Usia Lanjut	0	0	0	0	1	100	1	100
11	IDT	0	0	0	0	6	100	6	100
12	Persekutuan Doa	1	25	0	0	3	75	4	100
13	Kesenian	0	0	6	27,30	16	72,70	21	100
14	Paguyuban Warga Dusun	0	0	0	0	11	100	11	100
15	Siskamling	0	0	0	0	18	100	18	100
16	PKBM	0	0	0	0	1	100	1	100
17	LPMD	0	0	0	0	2	100	2	100
18	Keluarga Muda Mandiri	1	100,00	0	0	0	0	1	100
19	Klompencapir	0	0	0	0	1	100	1	100
20	Olahraga	0	0	0	0	10	100	10	100
21	Rukunwarga	0	0	0	0	6	100	6	100
22	Budaya/Adat	0	0	0	0	2	100	2	100
23	BPD	0	0	1	100	0	0	1	100
Jumlah		10	3,40	57	16,20	282	80,40	349	100

Dari data tersebut yang merupakan hasil kajian diketahui bahwa semua responden mengatakan mengetahui jumlah anggotanya dengan pasti. Dari data yang ada pada 23 jenis perkumpulan tersebut ternyata jumlah anggota lebih dari 20 orang yaitu dari kelompok rukun tetangga. Sedangkan yang beranggotakan antara 11-20 orang terbanyak adalah dasawisma.

Syarat menjadi anggota kelompok perkumpulan sosial ternyata sebagian besar (90,83%) atau sebanyak 317 kelompok didasarkan pada domisili di wilayah tertentu. Sedangkan sebagian kecil kelompok untuk menjadi anggota suatu kelompok yang mensyaratkan anggotanya dengan berdasarkan pada pendidikan ada sebesar 4,29% atau sebanyak 15 kelompok, diikuti dengan yang memiliki kekayaan sebesar 4,87% atau sebanyak 17 kelompok. Dari perkumpulan kelompok sosial yang menyatakan tidak memiliki persyaratan untuk menjadi anggota kelompok sosial ternyata terbanyak dari anggota kelompok dari Rukun Tetangga, PKK dan Dasawisma. Keadaan ini menunjukkan bahwa untuk menjadi anggota kelompok tidak dituntut persyaratan yang berat, kriteria anggota kelompok cukup berdomisili/bertempat tinggal di wilayah tertentu. Karena perkumpulan ini dibentuk oleh masyarakat sehingga persyaratan keanggotaannya dan kepengurusannya diatur sendiri oleh kelompok tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam menentukan periode kepengurusanpun paling banyak adalah kurang dari 5 tahun sebesar 87,96% atau sebanyak 307 kelompok; lainnya selama periode 6 – 10 tahun sebanyak 24 atau sebesar 6,87% diikuti selama lebih dari 10 tahun sebanyak 18 kelompok atau sebesar 5,16%. Terhadap jawaban pertanyaan yang menjawab terhapap kepengurusan kelompok dipegang atau dijabat lebih dari 10 tahun ini menunjukkan bahwa kepengurusan tersebut memiliki masa kerja yang tidak ditentukan/tidak tentu; hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perkumpulan masih sangat sederhanna dan belum mengacu pada aturan-aturan yang jelas, biasanya masih berdasarkan saling percaya dan menghormati yang tua, sehingga yang ditunjuk sebagai ketua/pengurus kelompok adalah tokoh yang disegani atau dianggap tua, tanpa melihat kemampuan untuk mengelola perkumpulan. Perkumpulan seperti ini biasanya masih sangat

konvensional, tradisional dan berjalan berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah dijalani, tanpa ada upaya pengembangan baik program maupun kegiatannya.

D. Sumber Daya

Sumber daya dari perkumpulan sosial dari hasil kajian yang dapat diuraikan ada dua yakni: sumber daya manusia dan sumber dana. Sumber daya manusia dapat dilihat dari segi pendidikan dan usia. Dari segi pendidikan anggota masing-masing perkumpulan responden menjawab lebih dari satu tingkat/ jenjang pendidikan dimana yang terbanyak adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah SLTA kemudian diikuti yang berpendidikan SLTP dan Sekolah Dasar. Sedangkan dari segi usia anggota masing-masing perkumpulan memiliki anggota yang yang terbanyak berusia antara 19 – 39 tahun sebesar (40,80%) atau sebanyak 217 anggota dan yang berusia 40 – 60 tahun ada sebanyak 196 orang atau sebesar 36,80%. Ini menunjukkan bahwa potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja perkumpulan.

Jika dilihat dari sumber dana masing-masing kelompok memiliki sumber dana dari iuran anggota dan dari sumbangan masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa kemauan anggota berkorban untuk kelangsungan kegiatan kelompoknya cukup besar.

E. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan kelompok/ perkumpulan sosial tidak dapat disajikan dalam bentuk data angka karena jawaban yang diperoleh semuanya jawaban dari pertanyaan yang terbuka dan jawabannya sangatlah beragam. Namun program dan kegiatan perkumpulan tersebut kebanyakan selaras dengan jenis kelompoknya. Kegiatan yang dilakukan kelompok/perkumpulan tersebut terbanyak adalah kegiatan arisan dan simpan-pinjam dan kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut dilakukan seperti kelompok PKK, Dasawisma, Rukun Warga, Rukun Tetangga, arisan, paguyuban baik dusun maupun desa rata-rata mempunyai kegiatan arisan dan simpan-pinjam sebagai pengikat dan bahan pertemuan kelompok.

Hampir semua program dan kegiatan yang dilakukan perkumpulan sosial ditujukan untuk mensejahterakan anggota dengan cara mengutamakan memberikan pelayanan kebutuhan orang anggota dari pada kebutuhan orang yang memerlukannya namun bukan anggota kelompok. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya, sarana yang dimiliki perkumpulan-perkumpulan sosial tersebut. Meskipun demikian dapat dikatakan hampir semua program dan kegiatan telah menunjukkan upaya-upaya penanganan masalah sosial dengan metoda "case work" dan "group work". Jika kita telusuri perkumpulan-perkumpulan tersebut telah memiliki konsep dasar pekerjaan sosial, hanya saja mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara pengembangannya.

F. Nilai-Nilai Sosial Budaya

Dari berbagai kepentingan/kebutuhan/persoalan yang dirasakan oleh masyarakat menumbuhkan keinginan kelompok untuk memecahkan kepentingan secara bersama-sama. Berbagai kepentingan itu berupa kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan untuk hidup, kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktualisasi diri dan sebagainya. Keinginan untuk memecahkan kepentingan/kebutuhan merupakan masalah yang perlu diselesaikan melalui pembentukan perkumpulan sosial yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keinginan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama ini bersumber pada nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki dan dikembangkan di tengah masyarakat dan merupakan kebiasaan masyarakat sejak jaman nenek moyangnya; nilai-nilai tersebut antara lain hasrat membantu orang lain yang sedang kesusahan, ke-

percayaan untuk saling pinjam-meminjam barang atau uang, menyampaikan informasi atau berita yang baik atau buruk, duka maupun suka, gotong royong dan lain sebagainya. Hasil kajian mengenai nilai-nilai sosial budaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Dari data yang diperoleh dari hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan nilai solidaritas perlu dipertahankan dengan cara membantu warga/anggota perkumpulan yang terkena musibah sebanyak 260 responden atau sebesar 28,70%; diikuti responden yang memberikan jawaban nilai-nilai solidaritas diberikan/dilakukan melalui kegiatan gotong royong sebanyak 292 atau sebesar 32,30%. Angka tersebut membuktikan bahwa kelompok/perkumpulan sosial tersebut sungguh-sungguh dijiwai oleh nilai-nilai yang bertujuan untuk membantu orang lain melalui kegiatan gotong royong. Keadaan ini merupakan potensi kesetiakawanan sosial yang dapat dikembangkan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagai wahana untuk meningkatkan ketahanan sosial di tingkat local dengan tanpa menunggu uluran tangan dari pemerintah.

G. Jaringan Kerja

Dari hasil kajian dilokasi pendataan dapat diketahui bahwa Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dapat dikatakan belum tampak adanya jaringan kerja antar kelompok/perkumpulan sosial yang ada, kecuali kelompok-kelompok yang terbentuk karena adanya intervensi dari pemerintah yang sebagian telah membentuk jaringan kerja, namun jaringan kerja itu masih terbatas dengan kelompok sejenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Jaringan Kerja Kelompok Sosial di Lokasi Kajian.

No	Jenis Kelompok	Jaringan Kerja Kelompok Sosial					
		Organisasi Sosial		Pemerintah		Jumlah	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Dasa Wisma	3	42,90	4	57,10	7	100
2	Posyandu	0	0	9	100	9	100
3	PKK	6	20,70	23	79,30	29	100
4	KUBE	0	0	26	100	26	100
5	Pemuda	6	85,70	1	14,30	7	100
6	Tani	0	0	6	100	6	100
7	Sinoman	3	100	0	0	3	100
8	Pengajian	7	100	0	0	7	100
9	Rukun Tetangga	4	14,30	24	85,70	28	100
10	Usia Lanjut	0	0	1	100	1	100
11	IDT	0	0	6	100	6	100
12	Persekutuan Doa	1	100	0	0	1	100
13	Kesenian	1	100	0	0	1	100
14	Paguyuban Warga Dusun	4	100	0	0	4	100
15	Siskamling	0	0	5	100	5	100
16	PKBM	0	0	1	100	1	100
17	LPMD	0	0	2	100	2	100
18	Keluarga Muda Mandiri	0	0	1	100	1	100
19	Klompencapir	0	0	1	100	1	100
20	Olahraga	0	0	4	100	4	100
21	Rukunwarga	0	0	6	100	6	100
22	Budaya/Adat	0	0	2	100	2	100
23	BPD	0	0	1	100	1	100
Jumlah		35	22,20	123	77,80	158	100

Dari hasil pendataan kurang dari 50% atau sebanyak 158 kelompok sosial jaringan kerja terbentuk karena adanya bantuan dari kelompok atau lembaga lain atau merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat Rukun Tetangga sampai Kabupaten atau Propinsi contohnya kelompok PKK. Jaringan kerja bentukan pemerintah biasanya berupa jaringan sejenis vertikal (berjenjang) seperti kelompok RT, RW, PKK. Sedangkan yang horizontal seperti PPKP, PHBS, UPPKS, PKBM.

Sebagian kegiatan bertumpu pada sumber-sumber lokal maka keberadaan kelompok-kelompok bentukan masyarakat lebih diwarnai dengan dukungan lokal, kebanyakan sumber-sumber yang digalipun lebih banyak pada intern anggota mereka atau donatur yang merasa terikat oleh kewajiban moral. Dukungan dari pemerintah terhadap perkumpulan sosial masih sangat terbatas pada perkumpulan bentukan masyarakat yang diprakarsai oleh pemerintah setempat.

H. Pembinaan Kelompok

Langkah-langkah pembinaan untuk memberikan motivasi dan melatih tenaga kerja atau dalam memberikan jasa nasehat yang diberikan kepada pengurus kelompok sebaiknya terlebih dahulu dikaji agar dengan kebutuhan dan permintaan anggota kelompok. Karena tujuan pembinaan ini adalah pelatihan dalam bentuk pengelolaan, pemasaran hasil produksi, penggunaan teknologi dan pengelolaan keuangan. Program pembinaan harus juga ditunjang dengan adanya bahan baku atau alat peragaan.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pembinaan kelompok di Kab. Gunung Kidul selama ini masih terbatas pada pendataan. Padahal menurut pejabat dari Dinas Sosial mereka para pengurus kelompok perlu mendapatkan pembinaan dan bantuan stimulan untuk digulirkan kepada anggota kelompok. Selain itu juga perlu adanya forum komunikasi

yang tujuannya untuk komunikasi edukasi dan tukar informasi antar kelompok sosial yang sejenis maupun yang heterogen. Dengan pemberian stimulan tersebut dari Dinas Sosial khususnya perlu memonitoring kegiatan dan penggunaan dana bagi kelompok sosial dengan cara mengadakan pendataan dan mengidentifikasi kelompok sosial yang ada.

1. Manfaat Kelompok Sosial bagi Anggota

Manfaat yang dirasakan antar anggota kelompok dapat dilihat dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi sosial adalah meningkatnya rasa kebersamaan dan kegotongroyongan yang satu dengan yang lainnya sedangkan manfaat dari segi ekonomi adalah adanya fasilitas untuk mendapatkan pinjaman baik barang, uang maupun tenaga. Hal ini dikarenakan jenis kelompok sosial yang mereka ikuti berbeda, juga karena ketrampilan anggota untuk mengembangkan kelompok juga berbeda.

Selain memiliki manfaat ekonomi, dilihat dari segi sosial tampak meningkatnya kemampuan berorganisasi dan bertambahnya teman. Disamping itu pengetahuan anggota kelompok juga meningkat seiring dengan seringnya mengikuti pertemuan yang diadakan untuk membahas persoalan dan hambatan yang timbul dalam kegiatan yang dilaksanakan secara rutin.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. WKSBM di Kabupaten Gunung Kidul sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun.
2. Jumlah kelompok WKSBM di tiap-tiap desa rata-rata diatas 50 kelompok perkumpulan.

3. WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam upaya mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat dan pada umumnya memiliki kriteria keanggotaan menempati atau berdomisili pada wilayah tertentu.

4. Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara dibiayai dengan iuran anggotanya sendiri.

5. Kegiatan WKSBM diwarnai dan dijiwai oleh semangat ingin membantu orang lain dan kegotong royongan

Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan intervensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalan sumber dana.

B. Rekomendasi

Pembangunan di Indonesia bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, partisipasi serta keterlibatan semua lapisan masyarakat sangatlah diharapkan. Peran Kelompok Sosial saat ini sudah diakui oleh pemerintah daerah, mengingat kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan sangat membantu terlaksananya program pembangunan terutama dalam menciptakan ketahanan sosial.

Peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masih sangat luas mengingat kompleksnya permasalahan dan jumlah serta luas wilayah golongan ekonomi lemah masih sangat banyak. Tinggal bagaimana pemerintah menyikapi hal itu agar program-program yang dilakukan kelompok-kelompok sosial yang ada di daerah mendapatkan dukungan dari pemerintah secara penuh dan dapat dimanfaatkan sebagai

pendamping program peningkatan kesejahteraan sosial yang ada di daerah-daerah. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan kelembagaan yang ada di daerah dengan cara:

1. Memberikan pelatihan bagi pengurus kelompok sosial.
2. Perlu memberikan bantuan stimulan untuk digulirkan kepada anggota kelompok sosial yang ada.
3. Perlu dibentuk forum yang tujuannya untuk membentuk wadah/sarana komunikasi, edukasi dan memberikan informasi antar kelompok sosial di tingkat lokal baik untuk kelompok yang sejenis maupun yang heterogen.
4. Perlu adanya monitoring dari pemerintah dalam bentuk pendataan dan pengidentifikasian kelompok sosial yang ada di daerah kekuasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syarwani dan Meuthia Gani Rochman. 1992. *Pembangunan Swadaya Nasional*, Jakarta; LP3ES.
- Anonim. 1997. *Peranan Program Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUBE*, Jakarta; Dit. Bin Bansos.
- 1998. *Menteri Sosial RI Pada Sidang Kabinet terbatas Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan*, Jakarta; Dit. Bin Bansos.
- 2003. *Pola Penanggulangan Kesejahteraan Sosial Menteri Sosial RI*, Jakarta; Departemen Sosial RI.
- Dorojatun Kuntjoro-Yakti. 1996. *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Florus, Paulus, et.al. 1994. *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transpormasi*, Jakarta; LP3S-IDRD dengan PT.Grasindo.
- Larso, Wursito. 1995. *Pemerataan Pembangunan Antara Harapan dan Kenyataan*. Bergetar, Solo.
- Sutopo HB. 1993. *Konsep Pembangunan Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan Ditinjau Dari Sudut Sosiologi Pembangunan Antara Peluang dan Tantangan*. Bergetar, Solo.
- Twikromo, Argo. 1993. *Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan Kepemimpinan Kelompok*. Bergetar, Solo.
- Prastiwi, Ety. 1993. *Wanita Dalam Peranannya Sebagai Kader Pembangunan dan Ibu Rumah Tangga*. Bergetar, Solo.
- Maryanto, 1996. *Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ekonomi Rakyat Lewat Jaringan*. Bergetar, Solo.
- Muhammd, Rusdin. 1993. *Kelembagaan Desa Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat*, Bergetar, Solo.
- Wardani, Nila. 1993. *Sebuah Bentuk Dampingan Bagi Wanita Pekerja Industri Rumah Tangga*, Bergetar, Solo.
- Midgley, James, 2005. *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta; Diperta Islam Departemen Agama.

Nurdin dan Suradi, 2004. *Penelitian Peranan Organisasi Lokal Dalam Pengembangan Masyarakat*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.9, No.01, Pusbang UKS, Balatbang, Departemen Sosial RI.

Korten, David.C, 1982. *Pembangunan Berpusat Pada Rakyat*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.

Wirotomo, Paulus, 2004. *Makalah Kontruksi Jaring Pranata Sosial Untuk Penguatan Ketahanan Sosial (Kerangka Konseptual)*, Jakarta.

BIODATA PENULIS :

Suyanto, Alumnus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 1989, kini Ajun Peneliti Madya pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.